



**LAPORAN
MONITORING DAN EVALUASI
RENCANA KERJA (RENJA)
SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
TAHUN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya, Alhamdulillah Penyusunan Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025.

Laporan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 merupakan dokumen evaluasi pelaksanaan kerja DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju untuk periode Triwulan II. Penyusunan Laporan Evaluasi RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju mengacu pada dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026.

Sebagai penutup, segala hal yang termuat dalam laporan ini kiranya dapat memberi manfaat dalam pertimbangan dan keberlanjutan.

Mamuju, Juli 2025

**Plt. Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian**



Akhmad Taufiq, S.Ip., M.Si.
Pangkat : Pembina
NIP.197901022011011006

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
Bab I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	1
1.3 Maksud dan Tujuan	3
1.4 Manfaat	4
1.5 Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025	4
Bab II KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA	7
Bab III EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025	15
3.1 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025	16
3.2 Program dan Kegiatan RENJA Perangkat Daerah	17
Bab IV ANALISIS DAN PERMASALAHAN	33
4.1 Analisis Hasil Capaian Kinerja	33
4.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan RENJA Pada Triwulan I	34
Bab V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	38
5.1 Kesimpulan	38
5.2 Rekomendasi	38

DAFTAR TABEL

No.	Nama Tabel	Halaman
1.	Tabel 1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju dalam Kaitannya dengan Dukungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	5
2.	Tabel 2.1 Konsistensi Perencanaan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah	8
3.	Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026	15
4.	Tabel 3.2 Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DISKOMINFOSIP Tahun 2025	16
5.	Tabel 3.3 Hasil Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja dan Penyerapan Dana Program Kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	20
6.	Tabel 4.1 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	33
7.	Tabel 4.2 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	34
8.	Tabel 4.3 Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	35
9.	Tabel 4.4 Analisis Hasil Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi hasil Rencana Kerja DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dilakukan setiap semester berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan.

Berdasarkan amanat Pasal 259 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah yang di singkat RENJA Perangkat Daerah.

Evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Mamuju Tahun 2025 disusun berdasarkan target kinerja sasaran, program, kegiatan, sub kegiatan RENJA Tahun 2025 dan diselaraskan realisasi anggaran program/kegiatan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2025 serta Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun Anggaran 2025, melalui mekanisme analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada dokumen pelaksanaan anggaran untuk menemukan faktor-faktor pendorong dan penghambatnya baik teknis maupun non teknis serta alternatif pemecahan/tindak lanjut yang akan dilakukan.

1.2. Dasar Hukum

Dasar Hukum yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan Laporan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817)
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Nomor 70 Tahun 2016);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju No. 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2021-2026;
12. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
13. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Nomor 31 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Nomor 8 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mamuju Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Tahun 2024 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Mamuju Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan

Adapun maksud dari penyusunan laporan evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju untuk mengevaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025, reviu isu strategis pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2025 selanjutnya dijadikan acuan untuk menyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju tahun selanjutnya.

Adapun tujuan di susunnya Laporan Evaluasi Rencana Kerja DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju Tahun 2025 antara lain :

1. Untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, kelompok sasaran dan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
2. Untuk mengetahui faktor pendorong dan penghambat keberhasilan pencapaian kinerja program dalam rangka mendukung capaian target kinerja tahunan sasaran;
3. Untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kelompok sasaran dan penyerapan dana indikatif kegiatan RENJA Perangkat Daerah dicapai dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah serta sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
4. Sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun RENJA tahun berikutnya.

1.4. Manfaat

Hasil evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 dapat digunakan sebagai :

1. Bahan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) untuk tahun berikutnya;
2. Indikator penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Indikator penilaian kinerja Perangkat Daerah; dan
4. Bahan penilaian pencapaian rencana aksi program dan kegiatan pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

1.5. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2025

Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 dimana RENSTRA itu sendiri disusun berdasarkan acuan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju 2021-2026 yang di dalamnya termuat Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah periode 2021-2024.

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju ikut berpartisipasi dalam pencapaian Misi ke Satu dengan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.1
Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Mamuju
dalam Kaitannya dengan Dukungan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Visi : “ Mamuju Keren (Terwujudnya Masyarakat Mamuju Kreatif, Edukatif, Ramah, Energik, dan Nyaman) “			
Misi Satu : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas dan Pelayanan Komunikasi, Informatika dan Persandian	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik 2. Peningkatan Diseminasi Informasi melalui Pendayagunaan Media Informasi untuk Mengurangi Kesenjangan Informasi 3. Peningkatan Produksi Konten Informasi Publik 4. Peningkatan Pengembangan dan Pemberdayaan Lembaga Komunikasi Sosial Masyarakat 5. Peningkatan Kualitas SDM dan peran serta Pejabat Pengelola Informasi Publik
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pengembangan Infrastruktur teknologi informasi dalam pelaksanaan pemerintahan	Peningkatan Infrastruktur jaringan internet berbasis Fiber Optic (FO)
		Meningkatnya Layanan Pemerintahan yang Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumusan Kebijakan dan regulasi sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 2. Peningkatan Layanan Website, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah 3. Peningkatan Layanan Manajemen Data dan Informasi Elektronik Pemerintah Daerah 4. Peningkatan Kualitas sumberdaya manusia Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

	Meningkatnya Keamanan Informasi melalui Penyelenggaraan Persandian	Meningkatnya Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Peningkatan Pengembangan Kualitas Layanan Keamanan Informasi
	Terselenggaranya birokrasi Perangkat Daerah yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima	Menyusun Perencanaan dan Pengendalian Pelaksanaan serta Monitoring dan Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian yang Berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan Urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian berbasis kinerja 2. Pendampingan pelaksanaan program dan kegiatan urusan Komunikasi, Informatika dan Persandian 3. Evaluasi Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

BAB II

KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RENJA

Perencanaan dan penganggaran merupakan rangkaian kegiatan dalam satu kesatuan dan merupakan suatu siklus yang mempunyai hubungan yang erat dan bersifat realistis, tepat sasaran dan konsisten.

Keterkaitan perencanaan dan penganggaran tercermin melalui proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran merupakan instrumen penting bagi pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan. Output atau hasil akhir dari proses perencanaan pembangunan digunakan sebagai acuan dalam proses penyusunan APBD.

Kesesuaian antara dokumen perencanaan dan penganggaran sangatlah penting. Hal ini diharapkan akan mengoptimalkan penggunaan sumber daya dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan pelayanan publik sehingga akan berdampak pada tujuan pembangunan daerah.

Ketidaksesuaian antara dokumen perencanaan dengan APBD akan mengganggu pelaksanaan program dan kegiatan yang dijabarkan dalam APBD sehingga pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah menjadi sia-sia, tidak jelas dan mengakibatkan pemborosan anggaran.

Untuk mengetahui lebih lanjut konsistensi perencanaan dan penganggaran RENJA Perangkat Daerah perlu dilakukan analisis terhadap konsistensi program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok, sasaran, dan alokasi pendanaan indikatif Akhir Tahun RENJA Perangkat Daerah dengan program, kegiatan, indikator, target, lokasi, kelompok sasaran, dan alokasi pendanaan pada realisasi Akhir Tahun pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah.

Tabel 2.1
Konsistensi Perencanaan dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Kode	RENJA Perangkat Daerah					Dokumen Anggaran Setelah Pergeseran				
	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Anggaran
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
SASARAN PROGRAM										
<i>Terselenggaranya birokrasi OPD yang efektif, efisien dan berorientasi pelayanan prima</i>										
2 16 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100%	
2 16 01 2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	
2 16 01 2.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	4.868.500	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	22.971.000
2 16 01 2.01 02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	9.252.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen	5.078.750
2 16 01 2.01 04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	2.452.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA - SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen	1.673.000
2 16 01 2.01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	5.609.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan	3.168.000
2 16 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Keuangan	100%	

2 16 01 2.02 01	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2.611.212.509	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	34 Orang/ Bulan	2.737.776.057
2 16 01 2.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	85.160.000	Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	51.376.000
2 16 01 2.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	15.956.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	11.393.800
2 16 01 2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	
2 16 01 2.03 06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	11.670.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan	6.297.000
2 16 01 2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100%		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	100%	
2 16 01 2.06 02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	3.202.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1.331.600
2 16 01 2.06 04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	14.308.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	3.899.600
2 16 01 2.06 05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	4.752.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket	792.000

2 16 01 2.06 09	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	201.705.000	Penyelenggaraan rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	81.933.430
2 16 01 2.07	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%		Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	
2 16 01 2.07 05	Pengadaan Mebel	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket	19.020.000	Pengadaan Mebel	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 Unit	0
2 16 01 2.07 06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	83.192.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	51.846.000
2 16 01 2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
2 16 01 2.08 02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239.132.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	239.132.000
2 16 01 2.08 04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	36.696.900	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	35.685.870
2 16 01 2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	
2 16 01 2.09 02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	45.619.200	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	7 Unit	17.431.550
2 16 01 2.09 06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit	8.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit	4.450.000

2 16 01 2.09 09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	5.064.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kabupaten Mamuju	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	2.335.000
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya diseminasi informasi dan komunikasi publik</i>										
2 16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
2 16 02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Mamuju	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengenai kebijakan dan program prioritas	100%		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kabupaten Mamuju	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik mengenai kebijakan dan program prioritas	100%	
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi		
2 16 02 2.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	100%		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi dan SOP yang telah ditetapkan	100%	
			Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi					Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang dipublikasi		
2 16 02 2.01 14	Relasi Media	Kabupaten Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	161.272.000	Relasi Media	Kabupaten Mamuju	Jumlah Aktivitas Relasi Media Kepada Media yang Memenuhi Kriteria sebagai berikut: 1. Terverifikasi Dewan Pers, dan 2. Terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. Aktif Dalam Kegiatan Relasi Media	12 Laporan	80.802.740
2 16 02 2.01 15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	42.450.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kabupaten Mamuju	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60 Komunitas	28.726.500

2 16 02 2.01 17	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	12 Laporan	7.032.000	Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Permohonan Informasi Publik Yang Diselesaikan Sesuai Peraturan Perundangan	12 Laporan	2.361.500
2 16 02 2.01 19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik Yang Berkembang Dari Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	12 Laporan	33.197.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Rekomendasi Komunikasi Terhadap Isu Publik Yang Berkembang Dari Usulan Agenda Komunikasi Prioritas Pemerintah Daerah	12 Laporan	0
2 16 02 2.01 20	Diseminasi Informasi	Kabupaten Mamuju	Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	100%	28.226.000	Diseminasi Informasi	Kabupaten Mamuju	Persentase Khalayak Yang Terpapar Informasi Publik	100%	31.489.000
2 16 02 2.01 21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	1 Media	51.568.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Media Komunikasi Publik Milik Pemerintah Daerah yang Dikelola Maupun Pemanfaatan Media Berbayar Sesuai Kriteria/Juknis	1 Media	0
2 16 02 2.01 22	Penyusunan Konten	Kabupaten Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Laporan	33.020.400	Penyusunan Konten	Kabupaten Mamuju	Jumlah Konten Informasi Publik	12 Laporan	40.928.000
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik</i>										
2 16 03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Mamuju	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan layanan SPBE			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kabupaten Mamuju	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang telah menerapkan		
2 16 03 2.02	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	86%		Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online	86%	
			Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	89%				Persentase perangkat daerah yang memiliki portal dan situs web yang sesuai standar	89%	
2 16 03 2.02 17	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Kabupaten Mamuju	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	12 Laporan	57.166.000	Koordinasi pengelolaan Data dan informasi	Kabupaten Mamuju	Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	12 Laporan	44.587.970
2 16 03 2.02 18	Koordinasi penyusunan dan/atau rewi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	12 Laporan	71.683.000	Koordinasi penyusunan dan/atau rewi arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah	Kabupaten Mamuju	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	12 Laporan	9.900.000

2 16 03 2.02 21	penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Laporan	24.085.000	penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	12 Laporan	19.955.000
2 16 03 2.02 23	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	12 Laporan	62.238.000	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	12 Laporan	47.694.000
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya pemanfaatan statistik sektoral dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah</i>										
2 20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK									
2 20 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100%	
2 20 02 2.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral PD	100%		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral PD	100%	
2 20 02 2.01 09	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kabupaten Mamuju Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80%	7.769.000	Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Kabupaten Mamuju Mamuju	Persentase kegiatan statistik sektoral yang rilis tepat waktu	80%	2.296.000
2 20 02 2.01 10	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Kegiatan	24.767.000	Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1 Kegiatan	11.396.350
2 20 02 2.01 11	pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	12 Laporan	12.445.000	pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar	Kabupaten Mamuju Mamuju	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	12 Laporan	9.530.000
SASARAN PROGRAM										
<i>Meningkatnya keamanan informasi melalui penyelenggaraan persandian</i>										
2 21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									
2 21 02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten Mamuju Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100%		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kabupaten Mamuju Mamuju	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100%	

2 21 02 2.01	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	100%		Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	100%	
2 21 02 2.01 03	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Laporan	21.171.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Mamuju	Jumlah Laporan Monitoring Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	12 Laporan	8.013.000
2 21 02 2.02	Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim			Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim		
2 21 02 2.02 01	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	12 Laporan	16.000.000	Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Mamuju	Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung dalam Jaringan Komunikasi Sandi	12 Laporan	10.040.450
Total					4.060.960.509					3.626.291.167

BAB III
EVALUASI KINERJA PELAKSANAAN
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2025

Evaluasi Hasil Capaian RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Triwulan II Tahun 2025

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah dan rencana kerja pemerintah daerah.

Rencana Strategis (RENSTRA) adalah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Strategis pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026 dimuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Mamuju Tahun 2022-2026. Adapun Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju 2022-2026 :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju
Tahun 2022-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Tahun Ke-				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya Kualitas Layanan Komunikasi, Informatika Dan Persandian		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	80 %	90 %	90 %	90 %	90 %
	Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	62 %	69 %	79 %	84 %	94 %
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,6	3	2.35	2,5	2,75
		Indeks IPS	N/A	N/A	1,8	1,9	2
	Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	33 %	44 %	56 %	67 %	78 %
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	B	BB	BB	A	AA	

* Huruf yang di Bold adalah Kondisi akhir yang ingin di capai pada tahun berkenaan

3.1 Sasaran Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Tahun 2025

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, bisa dicapai dan rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Berdasarkan rumusan tujuan jangka menengah, maka ditetapkan sasaran jangka menengah DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju sebagaimana dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2
Sasaran, Indikator dan Target Kinerja DISKOMINFOSIP Tahun 2025

Sasaran (1)	Indikator Kinerja (2)	Target Tahun 2025 (3)	Realisasi s/d Triwulan II (4)
	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan komunikasi, informatika dan Persandian	90 %	Proses
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84 %	33,19 %
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,5	Proses
	Indeks IPS	1,9	Proses
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	67 %	80 %
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	A	Proses

Berdasarkan tabel diatas maka hasil capaian jangka menengah DISKOMINFOSIP pada posisi sampai dengan triwulan II ini sementara hanya dapat memenuhi 2 (dua) sasaran saja yaitu Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah dengan target capaian 84% dan terealisasi sebesar 33,19 % atau masih Sangat Rendah, dan Persentase Perangkat Daerah yang telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah dengan target capaian 67% dan terealisasi sebesar 80 % dimana capaiannya Tinggi hal ini dikarenakan target aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) untuk pejabat eselon III sudah terealisasi 128 ASN dari target 159 ASN, sedangkan untuk sasaran Indeks SPBE belum menghasilkan realisasi disebabkan tahapan penilaian untuk penilaian SPBE akan dimulai pada bulan April sesuai surat dari KEMENDAGRI demikian pula untuk sasaran Nilai AKIP Perangkat Daerah belum menghasilkan realisasi disebabkan penilaian baru akan dilakukan pada tahun berikutnya.

3.2 Program dan Kegiatan RENJA Perangkat Daerah

Berdasarkan rumusan tujuan dan sasaran diatas, maka DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju pada RENJA Tahun 2025 merancang pelaksanaan 5 program, 12 Kegiatan dan 33 Sub Kegiatan yang meliputi tiga urusan yang menjadi kewenangan DISKOMINFOSIP yaitu Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Indikator target program, kegiatan dan sub kegiatan adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang suatu program kegiatan, kegiatan serta sub kegiatan yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu kebijakan terhadap tujuannya. Indikator kinerja dalam RENJA Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian pembangunan daerah pada DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju.

Pagu program kegiatan DISKOMINFOSIP dalam Pergeseran APBD Tahun 2025 adalah sebesar Rp. 3.626.291.167 yaitu untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.278.570.657, Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik sebesar Rp. 184.307.740, Program Pengelolaan Aplikasi Informatika sebesar Rp. 122.136.970, Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral sebesar Rp. 23.222.350 dan Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi sebesar Rp. 18.053.450.

1. Untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
 - c. Administrasi Barang Milik Daerah pada SKPD
 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 2. Untuk Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
 - a. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah
 - Relasi Media
 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
 - Pelayanan Informasi Publik
 - Desiminasi Informasi
 - Penyusunan Konten
- 3. Untuk Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
 - a. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Koordinasi pengelolaan Data dan informasi
 - Koordinasi penyusunan dan/atau reuiu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah daerah
 - Penyelenggaraan sistem penghubung layanan pemerintah daerah
 - Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan kabupaten atau kota cerdas
- 4. Untuk Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
 - a. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
 - Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
 - Penyelenggaraan statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia
 - Pelaksanaan proses bisnis statistik sektoral sesuai standar

5. Untuk Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi
 - a. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik
 - b. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Kabupaten/Kota
 - Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Hasil pelaksanaan evaluasi terhadap capaian kinerja dan penyerapan dana program kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pelaksanaan Evaluasi Terhadap Capaian Kinerja dan Penyerapan Dana Program Kegiatan
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Formulir E.6:
 EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN MAMUJU
 RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN MAMUJU
 PERIODE PELAKSANAAN : TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2025

- Indikator dan target Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mengacu pada Sasaran RKPD :
1. Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah : 84 %
 2. Indeks SPBE : Nilai >5
 3. Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah : 67 %
 4. Nilai AKUP : Predikat A

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD Tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD Tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR YANG DILAKSANAKAN																											
URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																											
2.06 DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN																											
I	Layanan urusan Pemerintah Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks kualitas penunjang urusan pemerintah daerah	100	%	16.449,909,383	77%	12.609,906,408	20	3.278,570,657	21%	681,882,767	28%	922,168,882	0%	-	0%	-	0%	1.604,051,649	2.4%	48.9%	1.26	14.213,938,957	1.26	86.4%	Diskominfosip
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	dok	113,000,000	30	71,981,600	10	32,890,250	5	1,727,000	2	3,486,000	-	-	-	-	7	5,213,000	70.00	15.85	37	77,174,600	74.00	68.30	Diskominfosip
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	dok	27,000,000	6	21,117,660	2	22,921,000	-	-	1	1,370,000	-	-	-	1	1,370,000	50.00	5.96	7	22,487,660	70.00	83.29	Diskominfosip	
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	10	dok	27,000,000	6	21,161,240	2	5,078,250	-	-	1	616,000	-	-	-	1	616,000	50.00	12.13	7	21,777,240	70.00	80.66	Diskominfosip	
			Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	10	dok	32,000,000	6	13,989,000	2	1,673,000	1	103,800	-	-	-	-	1	103,800	50.00	62.04	7	15,027,000	70.00	46.96	Diskominfosip		
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20	dok	27,000,000	12	15,693,200	4	3,168,000	4	669,000	-	1,500,000	-	-	-	4	3,169,000	100.00	69.10	16	17,882,200	80.00	66.33	Diskominfosip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		62.50		37.31			72.50	69.38			
Predikat Kinerja																			R		S			S			
II	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dok/laporan adm. keuangan yang disusun	5	lap	13,366,272,183	3	10,188,215,695	36	2,800,545,857	6	645,404,481	12	776,804,609	-	-	-	18	1,422,209,090	50.00	50.78	21	11,610,424,785	420.00	86.86	Diskominfosip	
			Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan	170	org/Bin	12,038,151,083	34	10,049,122,598	12	2,737,776,057	3	830,434,481	3	744,679,609	-	-	-	6	1,375,014,090	50.00	50.22	40	11,424,136,685	23.53	88.30	Diskominfosip	
			Jumlah Jasa Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	50	org	223,266,000	10	87,687,600	12	51,376,000	3	14,970,000	3	27,720,000	-	-	-	6	42,690,000	50.00	83.09	16	130,377,600	32.00	58.40	Diskominfosip	
			Jumlah Laporan keuangan yang disusun	60	dok	204,859,100	12	51,405,500	12	11,393,800	7	-	6	4,505,000	-	-	-	6	4,505,000	50.00	39.54	18	55,910,500	30.00	27.29	Diskominfosip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50.00	57.62			38.51	58.00				
Predikat Kinerja																		S		R			R				
III	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	11,670,000			12	6,292,000	3	800,000	3	4,844,000	-	-	-	6	5,644,000	50.00	89.63	6	5,644,000	50.00	48.36	Diskominfosip	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12	Lap	11,670,000			12	6,292,000	3	800,000	3	4,844,000	-	-	-	6	5,644,000	50.00	89.63	6	5,644,000	50.00	48.36	Diskominfosip	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		50.00	89.63			50.00	48.36				
Predikat Kinerja																		S		T			S				
IV	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	5	lap	1,141,000,000	3	632,399,933	1	87,990,630	0.25	7,157,000	0.25	12,075,945	-	-	-	1	19,832,945	50.00	22.55	4	652,232,878	70.00	52.16	Diskominfosip	
			Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia	135	Paket	350,000,000	58	225,800,500	1	3,331,600	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	58	225,800,500	42.96	64.51	58	225,800,500	42.96	64.51	Diskominfosip
			Jumlah bahan logistik yang tersedia	10	Paket	106,000,000	6	35,387,000	2	3,899,600	1	2,767,000	-	-	-	-	1	2,767,000	50.00	70.96	7	38,194,000	70.00	54.86	Diskominfosip		
			Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan	130,000	lembar/Paket	62,000,000	45,579	19,251,840	5	792,000	-	-	2	274,250	-	-	2	274,250	40.00	34.69	45,581	19,236,590	35.83	29.14	Diskominfosip		

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab					
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 = 8/9 x 100 %	14 = 12/13 x 100%	15 = 14/15 x 100 %	16	17							
4		Penyenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan	10	Lap	618,000,000	6	331,960,593	20	81,633,430	2	4,390,000	1	12,401,195	-	-	-	3	16,791,195	15,00	20,49	9	348,751,788	90,00	56,43	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																26,25	31,54	59,70	51,24								
Predikat Kinerja																S R	S R	R	R								
IV		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	lap	229,000,000	3	413,241,500	5	51,846,000	-	-	2	42,110,900	-	-	-	2	42,110,900	40,00	81,22	5	455,352,400	100,00	198,84	Diskominfo	
1		Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan	6	jenis	45,000,000	-	-	13	0	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Diskominfo		
2		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor diadakan	20	jenis	184,000,000	16	413,241,500	5	51,846,000	-	-	2	42,110,900	-	-	-	2	42,110,900	40,00	81,22	18	455,352,400	90,00	247,47	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																20,00	40,61	95,00	123,79								
Predikat Kinerja																S R	S R	S R	S T								
IVI		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	lap	1,260,814,200	3	1,105,897,868	1	174,817,870	0,25	17,836,286	-	80,164,628	-	-	-	0	98,000,914	25,00	35,66	3	1,205,898,732	65,00	95,48	Diskominfo	
1		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	15	jenis	615,000,000	9	683,551,518	12	239,192,000	3	15,836,286	3	65,248,128	-	-	-	6	81,084,414	50,00	33,91	15	764,635,932	100,00	124,33	Diskominfo	
2		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa pelayanan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	25	jenis	89,752,200	12	20,759,400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	12	20,759,400	48,00	23,13	Diskominfo		
3		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor	105	org	556,062,000	51	401,526,900	12	35,685,870	3	2,000,000	3	14,916,500	-	-	-	8	16,916,500	50,00	47,10	57	418,413,400	54,29	75,25	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50,00	40,66	101,34	111,36								
Predikat Kinerja																S R	S R	S T	S T								
IVII		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	5	lap	339,814,000	3	198,249,862	1	24,216,550	0,25	8,958,000	0	6,926,800	-	-	-	1	15,884,800	50,00	65,59	4	214,134,662	70,00	63,02	Diskominfo	
1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Operasional Lapangan, Pajak, dan Perawatan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara	35	unit	243,000,000	21	167,541,862	7	12,431,550	1	8,388,000	-	4,421,800	-	-	-	1	12,809,800	14,29	73,49	22	180,351,662	62,86	74,22	Diskominfo	
2		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	15	jenis	35,814,000	7	20,580,000	10	4,450,000	1	570,000	1	170,000	-	-	-	2	740,000	20,00	16,63	9	21,320,000	60,00	59,53	Diskominfo	
3		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dipelihara	5	unit	61,000,000	1	10,128,000	1	2,335,000	-	-	1	2,335,000	-	-	-	1	2,335,000	100,00	100,00	2	12,463,000	40,00	20,43	Diskominfo	
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																44,76	62,37	51,29	51,39								
Predikat Kinerja																S R	R	R	R								
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program I)																43,36	51,53	48,71	73,34								
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program I)																S R	R	R	S								
2.16	URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																										
II	Terwujudnya Layanan Informasi dan Komunikasi Publik	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik	100	%	6,058,049,490	26%	1,556,681,351	20	184,307,740	19%	34,321,900	23%	42,794,000	0%	-	-	42%	77,115,900	2,09	41,84	1	1,556,681,351	0,68	25,70	Diskominfo	
III		Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipublikasi	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipublikasi	100	%	6,058,049,490	26%	1,556,681,351	20	184,307,740	19%	34,321,900	23%	42,794,000	0%	-	-	42%	77,115,900	2,09	41,84	1	1,556,681,351	0,68	25,70	Diskominfo	
1		Monitoring Opn dan Aspirasi Publik	Jumlah Aduan dan Aspirasi Publik melalui media online	250	aduan	120,000,000	114	16,451,250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	114	16,461,250	45,60	13,72	Diskominfo		
2		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring informasi dan penetapan agenda prioritas komunikasi perda	1800	Lap	932,000,000	585	128,316,780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	585	128,316,780	31,39	13,77	Diskominfo		

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab				
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp					
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp													
3	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah konten informasi yang dipublikasikan melalui media luar ruang	450	konten	650,000,000	136	114,240,900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	136	114,240,900	30.22	17.58	Diskominfo						
4	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik yang dikelola	5	media (radio)	1,426,374,745	3	292,350,785	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	3	292,350,785	60.00	20.50	Diskominfo						
5	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pelaksanaan pelayanan informasi publik	226	kali	323,400,000	62	70,728,630	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	62	70,728,630	27.45	21.89	Diskominfo						
6	Layanan Hubungan Media	Jumlah Kerjasama (Sponsorship) dengan Media Massa	250	media	2,008,274,748	82	784,533,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	82	784,533,000	32.80	39.07	Diskominfo						
7	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Kemitraan Komunitas yang dibina	125	klp	598,000,000	217	150,000,006	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	0.00	217	150,000,006	173.60	25.08	Diskominfo						
8	Relasi Media	Jumlah Aktivitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dengan pers. 2. terdaftar di Dinas Kominfo. 3. aktif dalam kegiatan relasi media	12	Lap	160,072,000	12	80,802,740	3	25,400,000	3	15,381,500	-	-	-	-	6	38,781,500	50.00	48.00	6	38,781,500	50.00	24.23	Diskominfo						
9	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas dan Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo	60	Komunitas	61,752,000	60	28,726,500	5	2,220,000	2	1,100,000	-	-	-	-	7	3,820,000	11.67	13.30	7	3,820,000	11.67	6.19	Diskominfo						
10	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Pemohonan Informasi Publik	20	permohon	6,237,000	20	2,361,500	-	-	-	-	-	-	-	-	361,500	0.00	15.31	-	361,500	0.00	5.80	Diskominfo							
11	Diseminasi Informasi	Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik	100	%	49,790,000	100	3,1489,000	25	3,370,400	25	7,180,000	-	-	-	-	50	10,550,400	50.00	33.51	50	10,550,400	50.00	21.19	Diskominfo						
12	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	140	Konten	68,210,400	140	40,928,000	3	4,831,500	32	18,771,000	-	-	-	-	35	23,602,500	25.00	57.67	35	23,602,500	25.00	35.65	Diskominfo						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																														
Predikat Kinerja																														
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program II)																														
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program II)																														
5.46 URUSAN PEMERINTAH BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																														
III	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Persentase perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE	100	%	3,555,000,000	46%	1,623,216,684	20	122,136,970	11%	13,234,000	0%	-	0%	-	11%	40,531,775	0.54	33.49	2.63	1,623,216,684	2.63	45.66	Diskominfo						
III.1	Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase layanan public yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	100	%	3,555,000,000	46%	1,623,216,684	20	122,136,970	11%	13,234,000	206%	27,297,775	0%	-	0%	217%	40,531,775	10.86	33.49	2.63	1,663,748,459	2.63	46.80	Diskominfo					
1	Penataaksanaan dan Pengawasan e-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan hasil monitoring dan Pengawasan e-government	10	Lap	250,000,000	8	5,985,550	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	8	5,985,550	80.00	2.39	Diskominfo						
2	Pengelolaan Pusat Data Pemerintah Daerah	Jumlah OPD yang menyimpan data pada pusat data Pemerintah Daerah	44	OPD	25,000,000	-	7,405,900	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	7,405,900	0.00	29.52	Diskominfo						
3	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah regulasi dan rencana induk SPBE yang disusun	2	dok	100,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	-	-	0.00	0.00	Diskominfo						
4	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah sistem komunikasi intra pema yang dikelola	10	Aplikasi (web)	3,000,000,000	6	1,559,724,280	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	6	1,559,724,280	60.00	51.99	Diskominfo						
5	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi Yang Dikembangkan	5	Titik	130,000,000	1	19,328,500	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00	0.00	-	-	1	19,328,500	20.00	14.87	Diskominfo						

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	I		II		III		IV		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp
										K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp											
6		Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Sistem SPBE	Jumlah Laporan pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Ekosistem SPBE	1	Lap	50,000,000	1	30,772,454	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	1	30,772,454	100,00	61,54	Diskominfo				
7		Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi	Jumlah data dan informasi yang dipeta kan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah	89	Lap	87,995,700	12	44,587,970	3	11,194,000	3	13,062,775	-	-	-	6	24,258,775	50,00	54,40	6	24,258,775	6,74	35,87	Diskominfo				
8		Koordinasi Penyusunan dan/atau Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	89	%	30,750,000	3	9,900,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Diskominfo					
9		Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	89	%	24,085,000	12	19,955,000	3	2,040,000	3	8,550,000	-	-	-	6	10,590,000	50,00	53,07	6	10,590,000	6,74	43,97	Diskominfo				
10		Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas	89	%	89,610,000	12	47,694,000	-	-	6	5,685,000	-	-	-	6	5,685,000	50,00	11,92	6	5,685,000	6,74	6,34	Diskominfo				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		37,50	29,85			70,00	61,60					
Predikat kinerja																		S	R			S	R					
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program III)																		37,50	29,85			70,00	61,60					
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program III)																		S	R			S	R					
2.20	URUSAN PEMERINTAH BIDANG STATISTIK																											
IV	Terselenggaranya Kegiatan Statistik Sektoral	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah yang Menyediakan Data Statistik Sektoral	100	%	44,980,000	-	80	23,222,350	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Diskominfo					
VI.1		Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Data Satastatistik Sektoral PD	100	%	44,980,000	-	80	23,222,350	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Diskominfo					
1		Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral	Persentase Kegiatan Statistik Sektoral yang Rilis Tepat Waktu	80	%	7,769,000	80	3,295,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Diskominfo					
2		Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	1	Keg	24,767,000	1	11,396,350	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Diskominfo					
3		Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik	1	Dok	12,445,000	1	9,530,000	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	Diskominfo					
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																		0,00	0,00			0,00	0,00					
Predikat kinerja																		FALSE	FALSE			FALSE	FALSE					
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program IV)																		0,00	0,00			0,00	0,00					
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program IV)																		FALSE	FALSE			FALSE	FALSE					
2.21	URUSAN PEMERINTAH BIDANG PERSANDIAN																											
V	Meningkatnya pengelolaan dan pengamanan informasi	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi	100	%	503,198,949	18%	65,798,105	24	18,053,450	6	1,378,000	33%	6,020,000	-	7	7,398,000	27,17	40,98	16	73,196,105	32,20	28,54	Diskominfo				
VI.1		Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola	50	Jenis	325,198,949	9	47,840,345	12	8,013,000	3	1,848,000	800,000	-	3	1,848,000	25,00	20,57	12	49,488,315	24,00	15,22	Diskominfo					
1		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah laporan monitoring pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah	10	Lap	160,510,127	2	10,141,600	12	8,013,000	3	848,000	-	800,000	-	3	1,648,000	25,00	20,57	5	11,789,600	50,00	7,35	Diskominfo				

NO	Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (output)	Target Renstra OPD pada Tahun 2021 - 2026 (Akhir Periode Renstra OPD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra SKPD sampai dengan Renja OPD Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Realisasi Kinerja dan Keuangan Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja OPD yang dievaluasi (2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja OPD Tahun 2025 yang dievaluasi (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2024 (akhir tahun pelaksanaan Renja OPD Tahun 2025)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra OPD s/d tahun 2025 (%)		OPD Penanggung Jawab		
				K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K		Rp		K			Rp	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		23	24
3.		Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitas komunikasi dan informasi melalui Radio 558	120	radiogram	164,688,800	101	37,698,745	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.849.104.11	13 = 12/2 x 100%	14 = 6.112	15 = 14/5 x 100%	84.17	13.89	Diskominfosip				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																26.00	30.57	67.08	45.12									
Predikat Kinerja																S R	S R	S	S R									
V.II		Penetapan Pole Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim	50	%	178,000,000	58%	17,957,760	12	10,040,450	3	530,000	52%	5,220,000	0%	-	-	4	5,750,000	29.33	57.27	4.10	23,707,760	8.20	13.32	Diskominfosip		
1.		Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim	500	surat	178,000,000	291	17,957,760	12	10,040,450	3	530,000	3	5,220,000	-	-	-	6	5,750,000	50.00	57.27	297	23,707,760	59.40	13.32	Diskominfosip		
Rata-rata Capaian Kinerja (%)																50.00	57.27	59.40	13.32									
Predikat Kinerja																S R	R	R	S R									
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program V)																57.00	58.92	63.24	14.22									
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program V)																S R	S R	R	S R									
Jumlah Anggaran dan Realisasi dari Seluruh Program																3,626,239,167												
Total Rata-rata capaian kinerja (%) Dari Seluruh Program (Program I s/d V)																1,729,097,124												
Predikat Kinerja Seluruh Program (Program I s/d V)																29.14	30.77	59.91	39.62									
Predikat Kinerja																S R	S R	R	S R									

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

- Kepedulian pimpinan terhadap penyelenggaraan urusan komunikasi informasi publik dan persandian;
- Tersedianya media informasi dan komunikasi untuk didayagunakan;
- Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan publik;

Faktor penghambat pencapaian kinerja:

- Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan sistem informasi
- Masih rendahnya kualitas dan kuantitas SDM dalam bidang teknologi dan pengolahan data sektoral
- Keterbatasan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan kegiatan

Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya*):

Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota berikutnya*):

Predikat Kinerja

ST = Sangat Tinggi

T = Tinggi

S = Sedang

R = Rendah

S R = Sangat Rendah

Disampaikan,
Mamuju, Juli 2025
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN
KABUPATEN MAMUJU

AKHMAD TAUFIQ, S.I.P., M.Si
NIP. 197901022010011006

Dievaluasi,
Mamuju, 2025
KEPALA BAPPERIDA
KABUPATEN MAMUJU

H. BUDIANTO MUNI, S.I.P., M.Si
NIP. 197112161991011001

3.2.1 Urusan Penunjang Pemerintahan

a. Capaian Kinerja Program

Rata-rata tingkat capaian kinerja program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota mencapai 42,47 persen atau dengan predikat sangat rendah “SR”.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp. 3.278.570.657 dengan realisasi sebesar Rp. 1.604.057.649 atau mencapai 44,25 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”. Adapun rata-rata capaian output kegiatan masih sangat rendah dikarenakan adanya penyesuaian efisiensi anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pelaksanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dengan sasaran Peningkatan Layanan Urusan Pemerintah Daerah. Program ini didukung oleh 7 Kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator jumlah dok/laporan, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja PD yang disusun dengan target kinerja 10 dok/laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 7 dok/laporan atau mencapai 70 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 37,31 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun dimana target 2 dok/laporan, terealisasi 1 dok/laporan Renja Perubahan atau 50 persen dan kinerja keuangan mencapai 5,96 pesen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen RKA dan RKAP yang disusun dimana target 2 dok/laporan, terealisasi 1 dok/laporan RKAP atau 50 persen dan kinerja keuangan mencapai 12,10 pesen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD dengan indikator Jumlah Dokumen DPA dan DPPA yang disusun dimana target 2 dok/laporan, terealisasi 1 dok/laporan atau 50 persen dan kinerja keuangan mencapai 62,04 pesen.

- Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dimana dengan target 4 dok/laporan, terealisasi 4 dok/laporan atau 100 persen. Namun kinerja keuangannya hanya mencapai 69,10 persen saja.
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah dok/laporan adm. Keuangan yang disusun dengan target kinerja 36 dok/laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 18 dok/laporan atau mencapai 50,00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 57,62 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan indikator Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang terbayarkan Capaian kinerja kegiatan mencapai 50,00 persen untuk 28 orang selama 6 bulan dengan 6 Laporan dan kinerja keuangan sudah mencapai 52,22 persen. Faktor pendorong capaian kinerja Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah sudah terpenuhinya kebutuhan pembayaran gaji dan tunjangan ASN perbulan dari 28 ASN yang ada di DISKOMINFOSIP.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD dengan indikator Jumlah Jasa Penatausahaan dan Pegujian/Verifikasi keuangan SKPD dengan target 12 Dokumen, terealisasi 6 Dokumen atau mencapai 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 83.09 persen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dengan indikator Jumlah Laporan keuangan yang disusun dengan target 10 Laporan, terealisasi 6 Dokumen atau mencapai 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 39,54 persen.
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 3 Laporan atau mencapai 50 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 89,63 persen dan predikat kinerja Tinggi “T”.
- Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD denfgan indikator Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD 12 Laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 6 Laporan atau mencapai 50 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 89,63 persen.

4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa 12 Laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 sebesar 3 Laporan atau mencapai 15 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 5,69 persen dan predikat kinerja sangat rendah "SR".
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan indikator Jumlah jenis Peralatan dan perlengkapan kantor yang tersedia dengan target 1 paket, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan indikator Jumlah bahan logistik yang tersedia dengan target 2 paket, terealisasi 1 paket atau mencapai 50 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 70,56 persen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan indikator Jumlah jenis barang cetak dan penggandaan dengan target 5 paket, terealisasi 2 paket atau mencapai 40 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 34,68 persen.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan indikator Jumlah laporan hasil rapat luar dan dalam daerah yang dikoordinasikan dengan target 20 Laporan, terealisasi 3 Laporan atau mencapai 15,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 20,49 persen.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 12 Laporan dimana kegiatan ini belum terealisasi sampai dengan triwulan 2 ini, yang mana sub kegiatannya tersebut adalah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Mebel dengan indikator Jumlah Mebel yang diadakan dengan target 13 Unit tidak dilaksanakan karena efisiensi anggaran.
 - Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan Mesin Kantor diadakan dengan target 5 unit, terealisasi 5 unit atau mencapai 40,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 81,22 persen.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 1 Laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 50,00 persen,

dengan kinerja keuangannya mencapai 40,66 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan indikator Jumlah Laporan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan dengan target 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau mencapai 50,00 persen dengan kinerja keuangannya 33,91 persen.
 - Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan indikator Jumlah Laporan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan target 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau mencapai 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 47,40 persen.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan indikator Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 1 laporan dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 44,76 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 63,37 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan dengan indikator Jumlah Kendaraan Operasional Lapangan roda 2 dan 4 yang dipelihara dengan target 7 unit, terealisasi 1 unit atau mencapai 14,29 persen dengan kinerja keuangan mencapai 73,49 persen.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan indikator Jumlah Peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara dengan target 10 unit, terealisasi 2 unit atau 20,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 16,63 persen.
 - Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan indikator Jumlah Gedung Kantor terpelihara dengan target 1 unit, terealisasi 1 unit atau 100,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 100,00 persen.

3.2.2 Urusan Pemerintah Bidang Komunikasi Dan Informatika

a. Capaian Kinerja Program

Rata-rata tingkat capaian kinerja program pengelolaan informasi dan komunikasi publik mencapai 27,33 persen atau dengan predikat sangat rendah “SR”. Sedangkan Rata-rata tingkat capaian kinerja program pengelolaan aplikasi informatika mencapai 37,50 persen atau dengan predikat sangat rendah “SR”.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program pengelolaan informasi dan komunikasi publik sebesar Rp. 184.307.740 dengan realisasi sebesar Rp. 77.115.900 atau mencapai 33,55 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”, dan program pengelolaan aplikasi informatika sebesar Rp. 122.136.970 dengan realisasi sebesar Rp. 40.531.775 atau mencapai 29,85 persen dengan predikat kinerja sangat rendah “SR”.

Pelaksanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik dengan sasaran Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 5 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dipublikasi 100 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 27,33 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 33,55 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
 - Sub Kegiatan Relasi Media dengan indikator Jumlah Aktivitas relasi media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers. 2. terdaftar di Dinas Kominfo. 3. aktif dalam kegiatan relasi media dengan target 12 Laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 48,00 persen.
 - Sub Kegiatan Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat dengan indikator Jumlah Komunitas Informasi Yang Aktif Mendiseminasikan Informasi dan Terdaftar di Dinas Kominfo dengan target 60 Komunitas, terealisasi 7 komunitas atau 11,67 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 13,30 persen.
 - Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik dengan indikator Jumlah Permohonan Informasi Publik dengan target 20 pemohon, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Kegiatan Diseminasi Informasi dengan indikator Persentase Khalayak yang terpapar informasi publik dengan target 100 persen, terealisasi 50,00 persen atau 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 33,51 persen.
 - Sub Kegiatan Penyusunan Konten dengan indikator Jumlah Konten Informasi Publik dengan target 140 Konten, terealisasi 35 konten atau 25,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 57,67 persen.

Pelaksanaan Program Aplikasi Informatika dengan sasaran Persentase perangkat daerah yang menerapkan layanan SPBE. Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 4 Sub Kegiatan (100 persen) dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota 20 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 37,50 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 29,85 persen dan predikat kinerja sangat rendah “SR”.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi dengan indikator dengan target 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 54,40 persen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan/atau Revisi Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan dengan target 2 Dokumen, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan indikator Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dengan target 12 Laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 53,07 persen.
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas dengan indikator Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas dengan target 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 11,92 persen.

3.2.3 Urusan Pemerintah Bidang Statistik

a. Capaian Kinerja Program

Rata-rata tingkat capaian kinerja program penyelenggaraan statistik sektoral mencapai 0,00 persen atau dengan predikat masih nihil “FALSE”.

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program penyelenggaraan statistik sektoral sebesar Rp. 44.981.000 dengan realisasi sebesar Rp. 0 atau mencapai 0,00 persen dengan predikat kinerja masih nihil “FALSE”. Adapun rata-rata capaian output kegiatan masih masih nihil.

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral dengan sasaran Persentase Perangkat Daerah Yang Menyediakan Data Statistik Sektoral.

Program ini didukung oleh 1 Kegiatan dan 3 Sub Kegiatan (100 persen) dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Presentase perangkat daerah yang menggunakan data statistik sektoral dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah 80 persen dan realisasi triwulan 1 mencapai 0.00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 0,00 persen dan predikat kinerja masih nihil "FALSE".
 - Sub Kegiatan Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral dengan indikator Persentase Kegiatan Statistik Sektoral Yang Rilis Tepat Waktu dengan target 80 persen, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia dengan indikator Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata dengan target 1 Kegiatan, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar dengan indikator Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik dengan target 1 dokumen, realisasi kinerja dan keuangan masih nihil.

3.2.4 Urusan Pemerintah Bidang Persandian

a. Capaian Kinerja Program

Rata-rata tingkat capaian kinerja program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi mencapai 31,25 persen atau dengan predikat sangat rendah "SR".

b. Capaian Kinerja Anggaran

Total anggaran program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi sebesar Rp. 18.053.450 dengan realisasi sebesar Rp. 7.398.000 atau mencapai 33,78 persen dengan predikat kinerja sangat rendah "SR".

Pelaksanaan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dengan sasaran Persentase Perangkat Daerah yang telah menerapkan prinsip sistem manajemen keamanan informasi. Program ini didukung oleh 2 Kegiatan dan 2 Sub Kegiatan dengan capaian sebagai berikut :

1. Kegiatan Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Sarana dan Parasarana layanan keamanan informasi yang dikelola 50 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 25,00 persen, dengan kinerja

keuangannya mencapai 20,57 persen dan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik dengan indikator Jumlah laporan monitoring pelaksanaan keamanan informasi pemerintah daerah dengan target 12 laporan, terealisasi 3 laporan atau 25,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 20,57 persen.
2. Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan indikator Persentase surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim 50 persen dan realisasi sampai dengan triwulan 2 mencapai 50,00 persen, dengan kinerja keuangannya mencapai 57,27 persen dan predikat kinerja Sangat Rendah “SR”.
- Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah surat melalui Email Sanapati yang diterima dan dikirim 12 laporan, terealisasi 6 laporan atau 50,00 persen dengan kinerja keuangannya mencapai 57,27 persen.

BAB IV
ANALISIS DAN PERMASALAHAN

4.1 Analisis Hasil Capaian Kinerja

4.1.1 Capaian Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik

Tabel 4.1
Analisis Hasil Capaian
Sasaran Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Diseminasi Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	84 %	33,19 %

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya Penyebaran Informasi Terkait dengan Pencegahan Stunting, Sosialisasi Sampah dan Diseminasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tepat Waktu melalui penyebaran informasi lewat kendaraan keliling sebanyak 9 kali di 7 Kecamatan selama Januari-Juni;
2. Terlaksananya pelayanan Sound System sebanyak 3 kali untuk kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah;
3. Terlaksananya diseminasi informasi melalui pembuatan spanduk/baliho informasi hari besar Nasional dan informasi pembangunan pemerintah Kabupaten Mamuju;
4. Terpublikasinya peliputan kegiatan Kepala Daerah dan perangkat daerah Kabupaten Mamuju sebanyak 155 kali selama bulan Januari-Juni melalui media sosial dan website Pemerintah Kabupaten Mamuju yang dikelola oleh Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
5. Terlaksananya kerjasama media online sebanyak 95 kali rilis dan media cetak sebanyak 4 kali rilis selama Januari-Juni;
6. Pengelolaan layanan aduan masyarakat melalui Laport SP4N sebanyak 3 aduan selama Januari-Juni, yang mana aduan tersebut telah terdistribusikan ke Perangkat Daerah (PD) yang bersangkutan.

4.1.2 Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik

Tabel 4.2
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks SPBE	2,5	Proses
	Indeks IPS	1,9	N/A

Pada Sasaran strategis ini secara detail dilakukan pengukuran dengan indikator kinerja Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik). Penilaian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik, meliputi empat domain yaitu kebijakan internal SPBE, Tata kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Layanan SPBE.

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya fasilitasi Zoom Meeting KDH/WKDH serta Perangkat Daerah sebanyak 36 Kegiatan selama Januari-Juni terkait ;
2. Tersedianya data Desa dan Puskesmas yang berada di pedalaman dan terpencil yang belum tersedia jaringan internet yaitu 39 Desa di 10 Kecamatan dan 9 Puskesmas.
3. Terlaksananya Evaluasi Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang sampai saat ini masih dalam tahap persiapan sosialisasi untuk Perangkat Daerah dan sekaligus pengumpulan data terkait penggunaan instrumen 47 indikator dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi SPBE.
4. Terlaksananya pengelolaan dan pemeliharaan server, website Pemerintah Kabupaten Mamuju serta aplikasi-aplikasi Pemerintah yang menjadi tanggung jawab DISKOMINFOSIP.

Untuk sasaran Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan indikator Indeks Pembangunan Statistik (IPS) bertujuan meningkatkan kualitas data statistik sektoral dengan rencana aksi yang dilakukan yaitu :

1. Terlaksananya Penyelenggaraan SDI Kab.Mamuju yaitu Forum SDI, Tim SDI, Kebijakan SDI dan Diseminasi SDI;
2. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektor (EPSS) yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dimana pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2025 ini tidak dapat dilaksanakan dikarenakan perubahan proses bisnis EPSS di tingkat pusat, akan tetapi tahapan pelaksanaan evaluasi tersebut tetap dilaksanakan untuk mempersiapkan EPSS tahun depan yaitu dengan Penetapan Diknas dan Disdukcapil sebagai produsen data untuk EPSS tahun 2025 dan Pengelolaan E-Walidata pada aplikasi SIPD;
3. Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektor Sesuai Standar yang telah memiliki rekomendasi dari pembina data yaitu BPS.

Kegiatan Statistik Sektor ini belum maksimal di laksanakan karena sampai saat ini Peraturan Bupati tentang Kelembagaan Dinas Kominfo masih pada tahap pembahasan di Provinsi sehingga ada beberapa kebijakan terkait kegiatan statistik sektoral belum dapat dilaksanakan sehingga program tersebut belum nampak capaian kinerjanya.

4.1.3 Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian

Tabel 4.3
Analisis Hasil Capaian Sasaran Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Keamanan Informasi Melalui Penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Sandi Dalam Komunikasi Perangkat Daerah	67 %	80 %

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu

1. Terlaksananya pengaktifasian Tanda tangan Elektronik (TTE) dengan menargetkan ASN dengan jabatan Eselon II, Eselon III dan Eselon IV untuk tahun 2025 dan selama Januari – Juni sudah terealisasi sebanyak 128 ASN yang telah memiliki dan memanfaatkan TTE;

2. Terlaksananya pengelolaan Email Sanapati dimana Email Sanapati ini merupakan e-mail khusus dengan user tertentu dengan enkripsi yang lebih kompleks sehingga mempunyai tingkat keamanan yang tinggi. Realisasi surat yang masuk melalui email sanapati 127 kali penerimaan dan pengantaran selama Januari-Juni.

4.1.4 Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima

Tabel 4.4
Analisis Hasil Capaian Sasaran Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju

Sasaran	Indikator Kinerja	Target Tahun 2025	Realisasi s/d Triwulan II
(1)	(2)	(3)	(4)
Terselenggaranya Birokrasi Perangkat Daerah (PD) Yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi Pelayanan Prima	Nilai AKIP	A	Proses

Rencana aksi yang telah dilakukan yaitu

1. Tersedianya dokumen perencanaan dan capaian kinerja DISKOMINFOSIP tepat waktu;
2. Terpenuhinya sarana dan prasarana ASN lingkup DISKOMINFOSIP dalam menunjang pelaksanaan tugas;

4.2 Permasalahan yang Dihadapi Dalam Pelaksanaan RENJA Pada Triwulan II

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam masing-masing bidang urusan adalah sebagai berikut :

1. Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika

Permasalahan dihadapi oleh DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan bidang urusan Komunikasi dan Informatika antara lain :

1. Kendaraan operasional untuk kegiatan informasi keliling mengalami kerusakan sehingga untuk sementara tidak dapat dimanfaatkan karena biaya pemeliharannya terkena dampak dari efisiensi anggaran;
2. Belum optimalnya keterbukaan informasi publik;

3. Belum optimalnya Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
4. Saat ini DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju belum memiliki gedung kantor yang representative sehingga kebutuhan ruangan khusus untuk melaksanakan kegiatan seperti ruangan server, studio, ruang editing, peralatan IT dan peralatan jurnalistik serta publikasi yang terbatas;
5. Kurangnya ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan urusan komunikasi dan informatika yaitu Programmer, Teknisi Jaringan, Videografer, Fotografer, Designer Grafis;
6. Ruang pusat data yang tidak memenuhi standar kelayakan.

2. Bidang Urusan Statistik

Permasalahan dihadapi oleh DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan bidang urusan Statistik antara lain :

1. Belum optimalnya penyusunan metadata statistik sektoral Perangkat Daerah (PD) di lingkungan Pemkab Mamuju;
2. Belum adanya ASN yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan urusan statistik yaitu Statistisi.

3. Bidang Urusan Persandian

Permasalahan dihadapi oleh DISKOMINFOSIP Kabupaten Mamuju dalam pelaksanaan bidang urusan Persandian antara lain :

1. Belum maksimalnya keamanan siber pada sistem informasi Pemerintah Daerah karena tidak ada sumberdaya manusia teknis di bidang Keamanan Jaringan dan Web.
2. Belum terdapatnya pengamanan firewall pada jaringan server DISKOMINFOSIP.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

Dari hasil evaluasi pelaksanaan RENJA DISKOMINFOSIP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Koordinasi yang baik antar unit kerja di DISKOMINFOSIP yang dikoordinasikan oleh Sekretariat dalam hal pengawalan target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen RENJA dan dalam hal pengawalan target anggaran Program/Kegiatan yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran selaras dengan target yang telah ditetapkan;
2. Mekanisme perencanaan dan penganggaran di Pemerintah Kabupaten Mamuju dilaksanakan tetap waktu sesuai dengan tahapan perencanaan dan penganggaran sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga apabila terjadi pergeseran kinerja dan anggaran dapat dilakukan secara optimal;
3. Konsistensinya nama kegiatan dan nama sub kegiatan dalam RENJA Tahun 2025 dengan DPA PD Tahun 2025 dalam penyusunan RENJA mengacu dengan Renstra Perangkat Daerah (RPD) Tahun 2022 - 2026 dan di DPA yang mengacu dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
4. Rata-rata capaian kinerja seluruh program pada DISKOMINFOSIP hingga Triwulan II Tahun 2025 mencapai 29,14 persen dengan predikat "Sangat Rendah" (SR) sedangkan capaian kinerja anggaran sebesar 30,77 persen dengan predikat "Sangat Rendah" (SR).

5.2 Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan di atas dan dari hasil pelaksanaan evaluasi RENJA DISKOMINFOSIP sampai dengan Triwulan II Tahun 2025, maka dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, perlu direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengendalian pelaksanaan RENJA Reformasi Birokrasi untuk mencapai nilai yang lebih maksimal;
2. Meningkatkan rata-rata capaian kinerja seluruh program dan capaian kinerja anggaran;

3. Meningkatkan koordinasi untuk tercapainya sasaran RENJA 2025 ke bidang-bidang, koordinasi antar Perangkat Daerah (PD) maupun lintas Kementerian/Kelembagaan dan lintas sektoral;
4. Tetap melaksanakan pelayanan publik sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
5. Dalam proses perencanaan khususnya penghitungan anggaran program kegiatan agar sedapat mungkin dilakukan secara detail dan menyeluruh memperhatikan situasi dan perkembangan sehingga pagu dana yang direncanakan sesuai dengan kebutuhan dan dapat meningkatkan tingkat capaian realisasi keuangan maupun kinerja pada tahun mendatang.

Kerjasama di lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju adalah salah satu kunci keberhasilan dalam menyelenggarakan kinerja yang optimal.

Demikian Laporan Evaluasi Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Mamuju Tahun 2025 ini disusun sebagai instrument monitoring kinerja dan harapannya dapat dipergunakan dengan baik untuk dievaluasi dan perbaikan kinerja pada periode-periode berikutnya.